

## BAB II

### MUHAMMADIYAH DAN ASAS PENOLONG KESENGSARAAN UMUM

Sudah berusia lebih dari satu abad, organisasi sosial-kemasyarakatan ini berkiprah di Indonesia. Tercatat ribuan sekolah dan rumah sakit berdiri demi terwujudnya cita-cita luhur dari sang pendiri. Terinspirasi dari Surat Ali Imran ayat 104 serta dengan pemahamannya yang mendalam atas Surat Al-Ma'un, K. H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Yang kemudian pemikiran beliau tentang Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) lebih dikenal dengan 'Teologi Al-Ma'un'. Atas dasar teologi Al-Maun inilah Muhammadiyah terus berkiprah di dalam bahkan di luar negeri.

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai profil Muhammadiyah termasuk sejarah berdirinya, visi-misi, dan amal usaha Muhammadiyah. Kemudian akan dipaparkan juga tentang bagaimana kiprah Muhammadiyah sebagai organisasi non-pemerintah terbesar di Indonesia yang mendasarkan gerakannya pada teologi Al-Ma'un dalam melakukan berbagai gerakan pembaruan dan di Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan pembahasan mengenai Majelis Penolong Kesengsaraan Umum sebagai usaha K.H. Ahmad Dahlan untuk melestarikan budaya tolong-menolong secara lebih terorganisir dan lebih modern. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai lahirnya program penanggulangan bencana Muhammadiyah yang sejatinya merupakan esensi dari Penolong Kesengsaraan Umum. Sedikit pemaparan tentang Yakkum Emergency Unit sebagai organisasi non-pemerintah mitra sekaligus kompetitor *Muhammadiyah Disaster*

*Management Center* menjadi penutup pembahasan dari bab ini

## **A. Profil Muhammadiyah**

Kehadiran Muhammadiyah di kancah pergerakan dan khazanah keagamaan tak cukup sekedar untuk dicatat. Namun juga terbukti mampu membuka gerbang baru bagi Islam ke-Indonesia-an dan ikut serta menentukan merah-biru perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebagai salah satu organisasi masyarakat yang kini telah berhasil mengukuhkan posisinya menjadi organisasi Islam modern terbesar di dunia, Muhammadiyah tidak hanya teruji oleh sejarah, melainkan juga turut menguji sejarah, bahwa sejarah bangsa Indonesia memang membutuhkan kehadiran sebuah gerakan seperti Muhammadiyah yang bergiat secara intens dan konsisten dalam ranah dakwah, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan kebodohan.<sup>27</sup>

Sebagai suatu unit organisasi non-pemerintah yang membidangi tidak hanya satu bidang saja, Muhammadiyah saat ini mempunyai 12 badan pembantu pimpinan yang disebut dengan Majelis. Badan-badan tersebut antara lain:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid,
2. Majelis Tabligh,
3. Majelis Majelis Pendidikan Tinggi,
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah,
5. Majelis Pendidikan Kader,
6. Majelis Pembina Kesehatan Umum,

---

<sup>27</sup> Dikutip dari situs resmi Muhammadiyah <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-177-dot-refleksi-perjuangan.html> diakses pada 11 Maret 2014

7. Majelis Pelayanan Sosial,
8. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan,
9. Majelis Pemberdayaan Masyarakat,
10. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia,
11. Majelis Lingkungan Hidup,
12. Majelis Pustaka dan Informasi.

Serta memiliki 8 lembaga yang bergerak di bawahnya. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

1. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting,
2. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan,
3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan,
4. Lembaga Penanggulangan Bencana,
5. Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqqoh,
6. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik,
7. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga,
8. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional.<sup>28</sup>

Muhammadiyah sebagai organisasi yang telah berusia lebih dari 1 abad dan memiliki sekitar 30 juta anggota, cabang di 33 provinsi, dan 20 ribu kelompok dalam tingkat akar rumput, kekuatan Muhammadiyah terletak pada<sup>29</sup> :

---

<sup>28</sup> Op. Cit.

<sup>29</sup> Tim Penyusunan dan Penebitan Profil Muhammadiyah 2010, Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Profil 1 Abad Muhammadiyah", Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000, hal. 93.

1. Reputasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern telah dikenal luas secara nasional maupun internasional. Hal ini berdampak pada berbagai kemudahan dan dukungan yang didapat oleh Muhammadiyah dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan di tingkat lokal maupun nasional.
2. Jaringan organisasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air dan beberapa negara ASEAN, membuat Muhammadiyah lebih mudah dalam mengembangkan aktivitas di tingkat akar rumput yang membutuhkan koordinasi berjenjang dan melibatkan partisipasi masyarakat di berbagai daerah.
3. Perkembangan amal usaha yang sangat besar secara kuantitatif juga menjadi aset sumber daya yang sangat berharga bagi organisasi untuk terus dapat bertahan di tengah badai krisis yang melanda negeri.
4. Perkembangan kehidupan nasional menempatkan Muhammadiyah sebagai modal sosial dan modal moral bagi bangsa dan seluruh partai politik, terutama partai berbasis komunitas muslim.

#### **a. Sejarah Pendirian Muhammadiyah**

Moehammadijah (Muhammadiyah) didirikan pada tanggal 8

kyai yang dikenal alim, cerdas, dan berjiwa pembaru yakni K. H. Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwisy di Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan dalam bentuk organisasi atau perkumpulan, atau perhimpunan resmi, yang sering disebut dengan persyarikatan. Muhammadiyah dari segi bahasa berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad. Yakni semua orang Islam yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Dengan kata lain, siapa saja yang mengaku beragama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sesungguhnya dia adalah Muhammadiyah, tanpa dibatasi oleh perbedaan golongan dan kedudukan di dalam masyarakat. Sedang dari segi istilah, dengan nama Muhammadiyah diharapkan gerakan ini dapat mencontoh segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad SAW.<sup>30</sup>

Muhammadiyah sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1905 oleh pendirinya, enam tahun kemudian didirikan sekolah Muhammadiyah yang bercorak modern. Satu tahun kemudian, K. H. Ahmad Dahlan dengan bantuan beberapa murid dan sahabatnya, beliau mendirikan persyarikatan Muhammadiyah. Pada tanggal 22 Agustus 1914 barulah Muhammadiyah disahkan oleh pemerintah setempat, Gubernur Jendral Belanda.

Saat itu keadaan umat Islam yang carut marut akibat banyak dilakukannya penyimpangan agama seperti bid'ah, takhayul, dan

khurafat serta keadaan umat Islam sendiri yang terbelakang dari segi kehidupan, K. H. Ahmad Dahlan terpanggil untuk mengubah keadaan dan melakukan perubahan. Dengan pendalaman pemahaman terhadap isi Surat Ali Imran ayat 104. Melalui Muhammadiyah, K. H. Ahmad Dahlan ingin menghadirkan Islam yang bukan hanya sebagai ajaran yang mengajak pada kesadaran iman terhadap tauhid semata, melainkan juga menghadirkan Islam sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala seginya, menghadirkan Islam yang buka sekedar ajaran “transendensi” murni yang hanya dipahami secara parsial, tetapi tidak hirau terhadap kehidupan. Namun lebih jauh lagi Islam ditampilkan sebagai kekuatan dinamis untuk transformasi sosial dalam dunia nyata kemanusiaan melalui gerakan “humanisasi” (mengajak pada serba kebaikan), dan “emansipasi” atau “liberasi” (pembebasan dari segala kemunkaran). Sehingga Islam diaktualisasikan sebagai agama langit yang membumi, yang menandai terbitnya fajar baru reformasi atau modernisasi Islam di Indonesia.<sup>31</sup>

#### **b. Visi-Misi**

Visi gerakan Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

“terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”<sup>32</sup>

Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Dikutip dari laman web resmi Muhammadiyah <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html> diakses pada 6 januari 2014

<sup>32</sup> Dikutip dari <http://kegiatan.muhammadiyah.or.id/profile/visimisimuh.html> diakses pada 13



5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
7. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk menyukseskan gerakan.
13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.

## **B. Muhammadiyah sebagai Organisasi Non-Pemerintah yang Berasaskan Teologi Al-Ma'un**

Muhammadiyah merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang sosial-keagamaan. Dalam hal keagamaan, dimana latar belakang umat Islam pada saat itu sangat lemah dikarenakan banyak terjadi penyimpangan agama dalam masyarakat Islam itu sendiri dan serangan misionaris Kristen dari Barat, Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan umat Islam pada ajaran murninya yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dengan tantangan yang ada, Muhammadiyah dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak mudah. Muhammadiyah dituntut untuk melakukan orientasi gerakan yang jelas. Kendati membawa muatan purifikasi atau pemurnian, gerakan Muhammadiyah pada awalnya bercorak transformasional.

Sebagaimana sifat dari gerakan transformatif yang memiliki jangkauan jauh dan sering kali bersifat revolusioner dan radikal dalam melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah restrukturisasi dalam kehidupan, Muhammadiyah mencerminkan dirinya sebagai gerakan transformatif. Dalam konteks dakwah, Muhammadiyah melakukan pembongkaran atas tatanan dan alam pikiran yang selama ini membelenggu dan menyebabkan keterbelakangan sehingga tercipta

Pemahaman yang begitu dalam atas Surat Al-Ma'un yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan, memberikan suatu pencerahan baginya. Dimana Islam seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Kepada para murid-murid dan kerabatnya, K. H. Ahmad Dahlan sangat menganjurkan mereka untuk memahami apa sebenarnya isi dari surat tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan. Untuk menciptakan kehidupan yang utama, masyarakat Indonesia harus dibebaskan, diberdayakan, dan dimajukan. Oleh karena itu, K. H. Ahmad Dahlan banyak melakukan pembaruan-pembaruan di berbagai macam bidang kehidupan. Yaitu dalam bidang pendidikan, gerakan perempuan, dan bidang sosial.

Pembaruan yang nyata yang pertama yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah yaitu pada bidang pendidikan. Organisasi ini menjadi pelopor pendidikan modern di Indonesia. Muhammadiyah mengintegrasikan aspek iman dan aspek kemajuan dalam sistem pendidikan yang digagasnya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di jaman modern tanpa terpecah kepribadiannya.

Dalam bidang sosial, melalui ajaran Al-Ma'un, K. H. Ahmad Dahlan melakukan terobosan yang luar biasa, yakni pemikiran yang kini mirip dengan konsep teologi pembebasan dalam perspektif Islam sebagaimana diperkenalkan oleh Asghar Ali Engineer dan para pemikir

membongkar kesadaran umat Islam tentang pentingnya konsistensi pemahaman Islam sebagai agama dan pengamalannya, sekaligus melakukan pelembagaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat tanpa terjebak pada formalisme. Islam dihadirkan bukan sebagai ajaran dogmatik atau statis, tetapi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memecahkan dan menjawab persoalan aktual, lebih khusus lagi dalam melakukan emansipasi atau pembebasan masyarakat kaum yang lemah dan terlemahkan serta kaum tertindas dan ditindas.<sup>35</sup>

Sejarah menyaksikan bahwa masyarakat modern dengan berbagai elemen kemajuannya di berbagai bidang seperti ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya perdamaian, aturan hukum, dan pendidikan telah mencapai peradaban tinggi yang sebagian bidangnya diklaim sebagai puncak terakhir dari perkembangannya. Sejarah juga menyaksikan bahwa mereka telah mencapai kesejahteraan hidup berstandar tinggi yang membuat sebagian orang menyatakan bahwa mereka telah berhasil mewujudkan surga di dunia. Oleh karena itu wajar, apabila negara-negara berkembang seperti Indonesia melaksanakan pembangunan untuk mentransformasikan masyarakatnya menjadi masyarakat modern sehingga sejajar dengan masyarakat-masyarakat modern di negara maju lainnya. Namun kenyataannya, tidak semua orang bisa merasakan kesejahteraan dari “buah” pembangunan tersebut. Rakyat

tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menjadi korbannya, masyarakat miskin yang semakin termarjinalkan.

Muhammadiyah sebagai organisasi non-pemerintah yang bercorak Islam sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar bertanggung jawab untuk ambil bagian dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Muhammadiyah mendasarkan gerakannya pada teologi Al-Ma'un. Pada prakteknya, pengamalan dari Al-ma'un dalam konteks kekinian sangat relevan dengan gagasan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang bersifat pembebasan ketika masalah kemiskinan dan sejenisnya tidak hanya bersifat sosial dan kultural tetapi lahir sebagai produk dari ketimpangan dan ketidakadilan struktural.

Surat Al-Ma'un menegaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah mereka yang melantarkan anak yatim dan orang miskin. Penegasan itu ditujukan terhadap mereka yang mengaku mempercayai agama dan menjalankan upacara keagamaan, namun pengakuan dan perbuatan mereka belum mencerminkan kejujuran dan kesungguhan iman. Dengan demikian Islam menurut surat Al-Ma'un adalah Islam yang sadar akan hak-hak anak yatim dan orang miskin. Atas dasar pemikiran inilah amal usaha Muhammadiyah menghadirkan diri sebagai pelayan bagi anak yatim dan orang miskin. Yang kemudian diperluas dan dikembangkan dalam berbagai gerakan pemberdayaan masyarakat

Salah satu kategori amal dari surat Al-Ma'un adalah membangun kerjasama melalui kemitraan dalam rangka mewujudkan kebaikan untuk mencapai cita-cita kehidupan yang utama. Kerjasama untuk mewujudkan kebijakan dan ketakwaan berarti mewujudkan kapasitas dan moralitas pribadi, moralitas publik, kebaikan individu, dan kebaikan publik. Oleh karenanya, dalam mengamalkan prinsip dasar gerakan ini Muhammadiyah bekerjasama dengan banyak pihak, baik pihak lokal, nasional, hingga internasional.

Selain itu, perintisan gerakan perempuan yang bernama Aisyiyah oleh Muhammadiyah, memperlihatkan bahwa Muhammadiyah juga memperhatikan peran perempuan dan gerakan ini juga sebagai gerakan "pembebasan" terhadap perempuan. Padahal kala itu tahun 1917, tradisi budaya kemasyarakatan yang berkembang yakni perempuan hanya bekerja pada tiga ranah saja; dapur, sumur, dan kasur. Yang kesemuanya bertempat di rumah. Tradisi budaya kala itu memandang tidak perlu bagi seorang perempuan keluar dari rumah, apalagi mengurus masyarakat. Pendidikan terhadap perempuan juga dipandang tidak penting. Dengan adanya gerakan "pembebasan" ini, para perempuan muslim diharapkan tidak hanya berada di dalam rumah saja, melainkan juga bermasyarakat belajar bersama demi mengangkat harkat martabat perempuan sehingga dapat menegakkan ajaran Islam di masyarakat dan memajukan perempuan

Melihat perkembangan dari gerakan Muhammadiyah yang sedemikian rupa, seorang antropolog dari Amerika Serikat mengadakan penelitian tentang Muhammadiyah pada tahun 1970. Berikut pandangannya, "Dalam setengah abad sejak berkembangnya pembaharuan di Asia Tenggara, pergerakan itu tumbuh dengan cara yang berbeda di bermacam macam daerah. Hanya di Indonesia saja gerakan pembaharuan Muslimin itu menjadi kekuatan yang besar dan teratur. Pada permulaan abad ke-20 terdapat sejumlah pergerakan kecil kecil, pembaharuan di Indonesia bergabung menjadi beberapa gerakan kedaerahan dan sebuah pergerakan nasional yang tangguh, Muhammadiyah. Dengan beratus-ratus cabang di seluruh kepulauan dan berjuta-juta anggota yang tersebar di seluruh negeri, Muhammadiyah memang merupakan pergerakan Islam yang terkuat yang pernah ada di Asia Tenggara. Sebagai pergerakan yang memajukan ajaran Islam yang murni, Muhammadiyah juga telah memberikan sumbangan yang besar di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Klinik-klinik perawatan kesehatan, rumah-rumah piatu, panti asuhan, di samping beberapa ribu sekolah menjadikan Muhammadiyah sebagai lembaga non-Kristen dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan swasta yang utama di Indonesia. 'Aisyiah, organisasi wanitanya, mungkin merupakan pergerakan wanita Islam yang terbesar di dunia. Pendek kata Muhammadiyah merupakan suatu organisasi yang utama dan terkuat di negara terbesar kelima di dunia."<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Dikutip dari laman web resmi Muhammadiyah <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content->

Pendirian dan pembangunan amal usaha Muhammadiyah, sejak awal pertumbuhan hingga perkembangannya dewasa ini merupakan perwujudan dalam usaha memberdayakan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan jika dilihat dari perspektif masa sekarang, apa yang telah diwujudkan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

### **C. Majelis Penolong Kesengsaraan Umum dan Lahirnya Progam Penanggulangan Bencana Muhammadiyah**

“Di mana-mana pada setiap jalan atau desa, kita jumpai bangsa kita sengsara karena miskinnya. Misalnya, banyak orang sakit atau mati, dan tak seorangpun menolongnya. Hal ini menimbulkan rasa kasihan. Siapa yang paling berkewajiban menolong mereka? Kita sendiri, bukan? Menolong orang dari penderitaan merupakan kewajiban kita. Kita umat manusia hidup dalam dunia ini.”

Kalimat dia atas merupakan kesedihan atas kemiskinan yang diderita oleh bangsa Indonesia yang dirasakan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Melihat bangsa Indonesia terjajah sedemikian rupa hingga menyebabkan kesengsaraan pada rakyatnya, Penolong Kesengsaraan Umum dibentuk sebagai upaya untuk menggerakkan tradisi tolong-menolong secara lebih terorganisir dan modern.

**a. Majelis Penolong Kesengsaraan Umum**

Secara embrional, gagasan pelayanan sosial dalam Muhammadiyah yang terkandung dalam surat Al-Ma'un telah diwujudkan oleh sang pendiri. K. H. Ahmad Dahlan memelopori berdirinya lembaga-lembaga pelayanan kesehatan, sosial, dan kesejahteraan. Secara kelembagaan dan upaya pengembangannya telah dilakukan dalam rapat anggota pengurus delapan tahun setelah organisasi ini didirikan, tepatnya pada tanggal 18 Juni 1920 dibentuklah empat bagian dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terdiri atas: Bagian Sekolah, Bagian Tabligh, Bagian Kesengsaraan Oemoem, serta Bagian Taman Poestaka.

Menjelang akhir hidupnya, K. H. Ahmad Dahlan mendirikan amal usaha poliklinik pertama milik Muhammadiyah pada tahun 1923 sebagai amal usaha dari Bagian Kesengsaraan Oemoem yang telah dibentuk pada saat rapat pengurus Muhammadiyah pada tahun 1920. Setelah sebelumnya pada 1920 K. H. Ahmad Dahlan mendirikan panti asuhan dan rumah penampungan untuk fakir miskin. Poliklinik ini bernama Penolong Kesengsaraan Oemoem dan menjadi embrio lahirnya rumah sakit, balai kesehatan, dan lembaga-lembaga pelayanan sosial dan kesehatan yang sekarang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Pada tahun 1962, tepatnya setelah Muktamar ke-35 di

Jakarta, Majelis DKU yang semula adalah singkatan dari Majelis

Penolong Kesengsaraan Umum berubah menjadi Majelis Pembina Kesejahteraan Umat. Amal usahanya diperluas, meliputi bidang santunan anak yatim, santunan anak miskin, santunan anak yatim piatu, BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak), poliklinik, rumah sakit, mengoordinasi para dokter muslim, mengoordinasi pembagian zakat fitrah, mengoordinasi pembagian daging kurban, memberikan pembiayaan dan pelayanan haji, memberikan bimbingan pemeliharaan dan penyelesaian jenazah, PPPK (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan), serta menyantuni anak cacat.

Pada tahun 1962 hingga 1965, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat menetapkan kerja minimumnya sebagai berikut:

1. Tiap-tiap cabang harus ada:
  - a. Pemeliharaan anak yatim piatu
  - b. Usaha penampungan fakir miskin
  - c. Mendirikan sedikit-dikitnya balai pengobatan pos PKU dan BKIA
  - d. Mengadakan tim gerak cepat untuk memberikan pertolongan sewaktu-waktu ada kecelakaan, bahaya bencana alam, dan sebagainya
  - e. Mendirikan biro penyuluh yang meliputi segala bidang kehidupan

f. Pemeliharaan rebani orang-orang sakit di rumah sakit

g. Penyelenggaraan amalan dalam keagamaan khusus seperti zakat fitrah, khitan, dan kurban

2. Mengusahakan adanya pendidikan bidang juru rawat serta bidang pendidikan keahlian bagi petugas PKU

3. Menyelenggarakan rencana keluarga Muhammadiyah secara integral dengan menyempurnakan jamaah

4. Menyelenggarakan usaha-usaha perekonomian yang dapat dijadikan landasan pembiayaan usaha PKU

Sesuai dengan kaidah Majelis dari PP Muhammadiyah No.08/PP/89 dan No.33/PP/86 tanggal 12 Desember 1986 tentang pokok-pokok Ketentuan Tentang Badan-badan Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, disebutkan tugas dan kaidah pokok Majelis PKU adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan kesadaran akan kewajiban hidup tolong-menolong dalam kebaikan,

2. Menanamkan ketakwaan serta menggerakkan kegiatan anggota-anggota beramal dalam bidang tolong-menolong sebagai rangkaian usaha untuk mencapai tujuan persyarikatan,

3. Memimpin dan membantu cabang dalam usaha-usahanya di bidang tersebut,

4. Membantu dan mengoordinasi kegiatan anggota dan masyarakat serta organisasi Islam yang bergerak dalam bidang

5. Mengusahakan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah dan badan serta lembaga lainnya,

6. Menyelenggarakan pendidikan untuk:

a. Membentuk tenaga dan petugas pertolongan yang berjiwa Islam dan sadar terhadap Muhammadiyah,

b. Mempertebal rasa keagamaan dan kesadaran akan kemuhammadiyah kepada para petugas sosial kemanusiaan,

c. Mempertinggi mutu dan kecerdasan para petugas tenaga pertolongan,

7. Menyelenggarakan usaha-usaha pertolongan sebagai percontohan masyarakat,

8. Menyelenggarakan dan memimpin musyawarah kerja majelis.

Untuk pengembangan dan kemajuan serta pelayanan masyarakat yang lebih intensif dan elektif, di tahun 1990 nama Majelis ini berubah dan terjadi pemisahan Majelis dengan nama Majelis Pembina Kesehatan serta majelis Pembina Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat. Namun pada tahun 2000 Majelis yang sudah terpisah tersebut kembali dilebur menjadi satu dan menjadi Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Kemudian pada tahun 2010 bertepatan dengan Mukhtar 1 abad Muhammadiyah atas usulan dari Forum Panti Sosial

Muhammadiyah-Aisyiah (FORPAMA), diresmikan pembentukan Majelis Pelayanan Sosial sebagai pengembangan dari konsep PKO.

Majelis ini mengalami perkembangan yang berkelanjutan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat hingga akhirnya terpecah menjadi Majelis Kesehatan Umum, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, dan Majelis Pelayanan Sosial yang berdiri masing-masing secara independen.

**b. Program Penanggulangan Bencana Muhammadiyah**

Kejadian bencana alam besar yang menyita banyak orang adalah tsunami Aceh 2004 silam. Dari sanalah dapat dikatakan kiprah tanggap bencana Muhammadiyah dimulai. Pada saat itu, Muhammadiyah belum memiliki badan atau lembaga khusus yang menangani masalah tanggap bencana. Pengiriman bantuan relawan dilakukan dengan koordinasi singkat. Banyak pelajaran yang diambil Muhammadiyah dalam kegiatannya membatu para korban bencana tsunami Aceh. Pengalaman kedua adalah kejadian gempa Yogyakarta pada 2006 silam. Tidak terbayang sebelumnya, daerah basis Muhammadiyah sendiri terkena bencana yang sedemikian dahsyatnya. Belajar dari kedua pengalaman tentang kegiatan tanggap bencana tersebut, pada tahun 2007 Muhammadiyah membentuk Pusat Penanggulangan Bencana dengan mengeluarkan

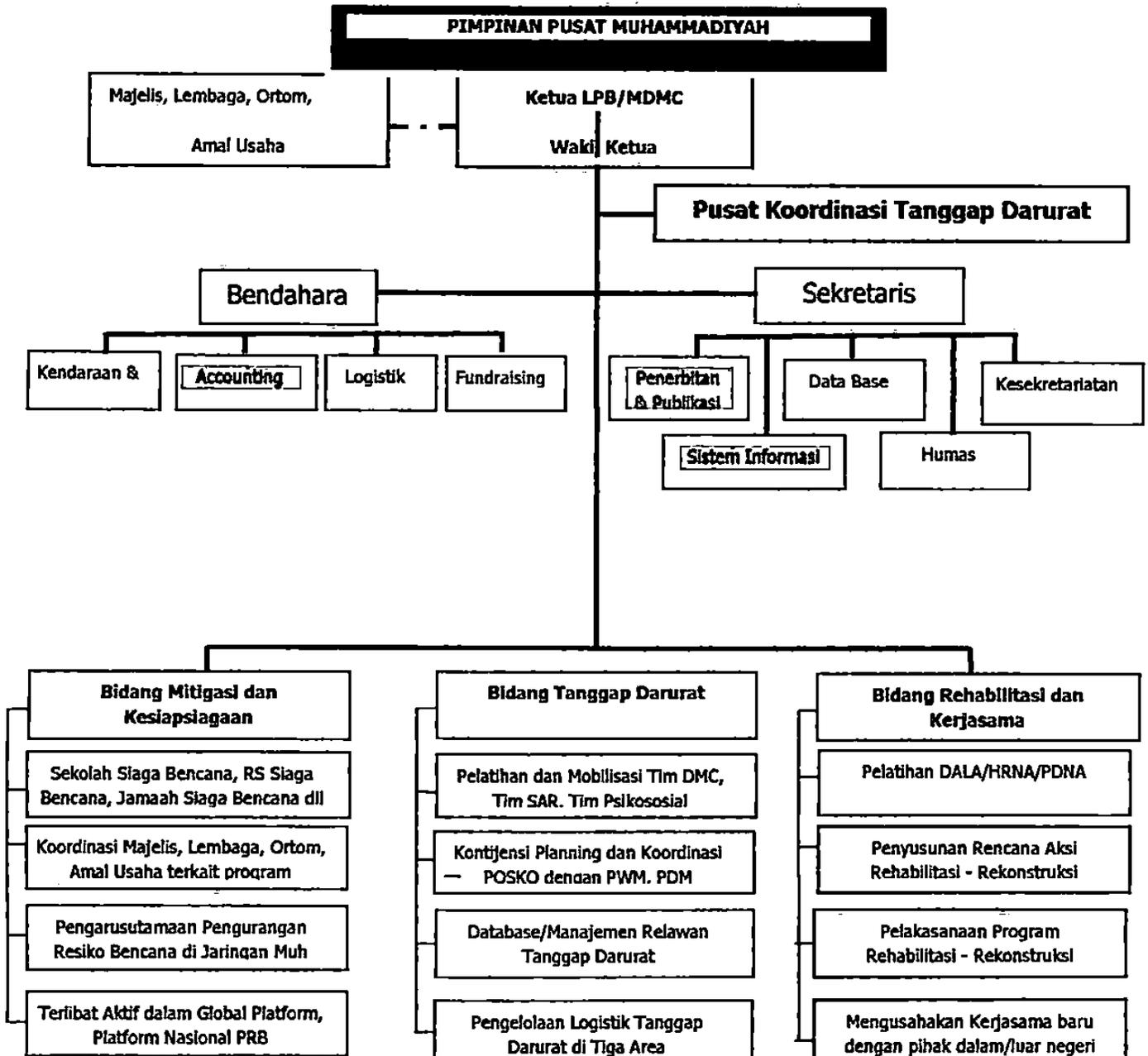
pengurus. Sebagai langkah lanjutan yang lebih baik dalam hal tanggap bencana. Diharapkan dengan terbentuknya Pusat Penanggulangan Bencana di bawah Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, sumber daya Muhammadiyah yang sangat banyak dapat dimanfaatkan secara maksimal pada kegiatan tanggap bencana darurat.

Namun pada perjalanannya, Pusat Penanggulangan Bencana melakukan kegiatannya secara *ad hoc*. Sudah sedikit lebih baik dari pada sebelum dibentuknya Pusat Penanggulangan Bencana. Tahun 2009, Padang dilanda gempa yang memakan korban tidak sedikit. Semakin banyaknya bencana yang terjadi, terutama bencana besar, menuntut Muhammadiyah untuk lebih terorganisir dan lebih baik dalam menanggapi keadaan darurat. Oleh karenanya, kemudian dikukuhkan Lembaga Penanggulangan Bencana yang mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pasca Muktamar tahun 2010, yang kini lebih dikenal dengan nama *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)*.

Agar lebih jelas, kami sajikan bagan struktur organisasi

Bagan 2. 1.

Bagan Struktur Organisasi MDMC.



Lembaga ini secara organisatoris merupakan upaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode pasca Muktamar 1 Abad di Yogyakarta untuk menerjemahkan paling sedikit 3 poin keputusan Muktamar, antara lain<sup>37</sup> :

1. Mengembangkan kesadaran bencana di lingkungan Muhammadiyah, kampanye kesadaran menghadapi bencana di masyarakat, advokasi sistem penanggulangan bencana, dan usaha-usaha lain dalam program rehabilitasi pasca tanggap darurat yang tersistem dengan program-program dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana dalam bentuk jejaring simpul-simpul tanggap darurat, rehabilitasi bencana di lingkungan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana; peningkatan kapasitas kader, relawan, dan pengelolaan penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan keterpaduan dan kesiapsiagaan AUMKESOS (Amal Usaha bidang Kesehatan dan Sosial) dan rumah sakit dalam penanggulangan bencana (respon dan mobilisasi), peningkatan kualitas manajemen dan pengadaan logistik tanggap darurat, serta advokasi dan rehabilitasi pasca bencana.

---

<sup>37</sup> Dikutip dari Laporan Pelaksanaan Program Kerja MDMC tahun 2012

MDMC bergerak dalam kegiatan penanggulangan bencana mencoba melakukan upaya penyadaran dan pengarusutamaan dalam pengurangan resiko sejalan dengan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana yang dilakukan terarah mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. MDMC mengadopsi kode etik kerelawanan kemanusiaan dan piagam kemanusiaan yang berlaku secara internasional, mengembangkan misi pengurangan resiko bencana yang selaras dengan *Hygo Framework for Action*, sebuah kesepakatan internasional yang membahas tentang membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana. Dimana dalam konferensi yang digelar di Hygo, Jepang pada 2005 silam menekankan pada kebutuhan untuk mengidentifikasi cara-cara yang sekiranya diperlukan untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana.

Dalam mewujudkan cita-citanya, MDMC memiliki visi sebagai berikut: “berkembangnya fungsi dan sistem penanggulangan bencana yang unggul dan berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana serta mampu memulihkan korban bencana alam secara cepat dan bermartabat”. Dan untuk mencapai visinya

... yang dimiliki oleh MDMC. Yaitu

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana di Muhammadiyah.
2. Mengembangkan kesadaran bencana di lingkungan Muhammadiyah.
3. Memperkuat jaringan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.<sup>38</sup>

Terdapat seperangkat prinsip dasar yang dapat diadopsi oleh Lembaga Penanggulangan Bencana untuk penerapan di Muhammadiyah, yaitu<sup>39</sup>;

1. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) harus menjadi bagian penting dari investasi besar Muhammadiyah di Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan untuk melindungi warga Persyarikatan dan masyarakat secara luas beserta aset-asetnya.
2. PRB harus terintegrasi dalam setiap rencana kerja dan program Muhammadiyah karena bencana merusak hasil-hasil pembangunan yang telah susah payah dicapai Muhammadiyah dalam kurun waktu 100 tahun terakhir.
3. Muhammadiyah melalui Lembaga Penanggulangan Bencana harus melihat bencana secara *multihazard* sehingga dapat meningkatkan efektivitas.
4. Pengembangan kapasitas adalah strategi pokok dalam implementasi PRB oleh Lembaga Penanggulangan Bencana untuk

<sup>38</sup> Dikutip dari <http://www.mdmc.or.id/index.php/profil-mdmc> diakses pada 13 September 2013

<sup>39</sup> P. A. Al-Hafid, ed., "Muhammadiyah dan Kerangannya: Bencana". Jakarta: Pustaka MDMC

membangun dan mempertahankan kemampuan organisasi, aktivis, warga persyarikatan dan masyarakat luas dalam mengelola risiko secara baik dan mandiri.

5. Implementasi PRB di Muhammadiyah harus terdesentralisasi tanggungjawabnya pada tingkat PWM & PDM, mengingat wilayah kerja yang sangat luas (30 provinsi dan 400 Kabupaten/Kota).

6. Di tingkat masyarakat, partisipasi adalah keharusan untuk efektivitas PRB. Lembaga Penanggulangan Bencana harus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan penerapan sehingga dapat memastikan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kebutuhan rakyat dan sesuai dengan tingkat kerawanan yang ada.

7. Lembaga Penanggulangan Bencana melihat jender sebagai faktor inti dalam PRB karena merupakan prinsip pengaturan utama dalam semua masyarakat, bahkan dalam tingkat akar rumput, wanita dengan peranannya sebagai pengguna dan pengatur sumberdaya lingkungan, penyedia ekonomi, pengurus dan pekerja masyarakat membuatnya sering berada dalam posisi untuk menangani risiko. Lebih dari itu, dengan adanya 'Aisyiyah dan Nasyiatul 'Aisyiyah sebagai sayap gerakan perempuan di Muhammadiyah akan memberi nilai lebih

8. Membangun kemitraan dengan swasta dan lembaga masyarakat berupa asosiasi bersama secara sukarela untuk mencapai tujuan dengan aktivitas kolaboratif.

Dalam pelaksanaannya MDMC berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada di Muhammadiyah serta aktif melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai visinya yakni meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana serta mampu memulihkan korban bencana alam secara cepat dan bermartabat.

**D. *Yakkum Emergency Unit* sebagai Mitra Sekaligus Kompetitor Muhammadiyah Disaster Management Center dalam Merespon Kejadian Bencana di Indonesia**

Sebagai organisasi non-pemerintah di Indonesia, Muhammadiyah tentu bukan satu-satunya organisasi non-pemerintah yang ada. Terdapat banyak organisasi non-pemerintah lain yang berkembang di Indonesia. Baik yang berafiliasi keagamaan tertentu seperti halnya Muhammadiyah, maupun organisasi non-pemerintah yang tidak memilih untuk berafiliasi dengan agama tertentu. Sebagai penutup dari bab ini akan dipaparkan mengenai salah satu mitra sekaligus kompetitor MDMC dalam kegiatannya yang menyangkut hal kebencanaan. Organisasi non-pemerintah yang kami pilih adalah *Yakkum Emergency Unit* atau yang lebih sering disingkat dengan YEU.

Indonesia adalah negara yang mengakui 6 agama besar, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Masyarakat Indonesia secara mayoritas memang menganut agama Islam, namun tidak sedikit pula yang menganut agama Nasrani, terutama Kristen. Dengan menyajikan pemaparan tentang sepak terjang organisasi non-pemerintah di Indonesia yang memiliki basis kepercayaan yang berbeda dengan Muhammadiyah diharapkan dapat membantu melihat sepak terjang Muhammadiyah secara objektif, tidak hanya pada kelebihanannya sebagai salah satu organisasi non-pemerintah yang berbasis agama Islam terbesar di Indonesia namun juga dapat melihat kekurangan dalam perannya sebagai organisasi non-pemerintah di Indonesia khususnya dalam merespon kejadian bencana alam.

**a. Profil Yakkum Emergency Unit**

*Yakkum Emergency Unit* (YEU) adalah salah satu unit kerja YAKKUM yang berdiri pada tahun 2001. Memiliki fokus pada kegiatan respon bencana dan kegiatan pengurangan resiko bencana. Sebagai unit kerja yang berfokus pada kegiatan kebencanaan, YEU memiliki visi yakni “penyintas bencana mendapatkan hak untuk hidup bermartabat dan berkesinambungan”. Dalam rangka mewujudkan visinya, YEU memiliki 3 buah misi, antara lain<sup>40</sup>:

<sup>40</sup> Dikutip dari situs resmi Yakkum Emergency Unit <http://yeu.or.id/About>. 11s diakses pada 20

1. Melakukan peningkatan kapasitas dalam pengarus-utamaan PRB (Pengurangan Resiko Bencana) untuk organisasi rakyat dan pihak terkait lainnya dalam manajemen bencana dan memfasilitasi jejaring yang berkelanjutan dengan organisasi rakyat yang mempunyai perhatian dalam hal manajemen bencana,
2. Meningkatkan kualitas program,
3. Peningkatan organisasional YEU.

YAKKUM sendiri adalah singkatan dari Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum yang merupakan sarana pelayanan kesehatan bagi penyembuhan (*healing ministry*) yang didirikan oleh Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah pada tanggal 1 Februari 1950. Sarana gerejawi ini merupakan kelanjutan dari Jeyasan Roemahsakit-roemahsakit Kristen di Djawa Tengah yang dirintis oleh Zending Gereja-gereja Gereformeede Belanda yang memulai misinya di Indonesia pada tahun 1899.<sup>41</sup>

Sebagai Yayasan Kristen yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan umum, YAKKUM memiliki visi sebagai berikut, “menjadi lembaga pelayanan yang secara proaktif mengusahakan kehidupan manusia beserta lingkungannya yang sehat sejahtera sebagai bagian

---

<sup>41</sup> Dikutip dari situs resmi YAKKUM <http://www.yakkum.or.id/tentang-kami/14-profil-singkat>

dari perwujudan karya penyelamatan Allah”. Sedangkan misinya yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah: <sup>42</sup>

1. Mewujudkan kehidupan manusia yang sehat sejahtera bagi semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, bangsa, agama dan kepercayaan, golongan, budaya, sosial-ekonomi, serta jenis kelamin,
2. Mewujudkan lingkungan hidup yang utuh dan sehat bagi kesejahteraan masyarakat.

**b. Sepak Terjang *Yakkum Emergency Unit* dalam Merespon Bencana di Indonesia**

YEU tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan MDMC dalam hal cakupan wilayah kerja tanggap darurat bencana di Indonesia. Sama halnya seperti MDMC, YEU memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, bahkan di dalam website reminya disebutkan bahwa area pelayanan YEU sampai dengan Myanmar<sup>43</sup>.

Unit kerja yang bergerak di bawah CD-Bethesda (*Community Development Bethesda*) telah mendampingi lebih dari 150 desa di Indonesia, Timor Leste, dan Myanmar. Mereka terus bekerjasama dengan jaringan 350 organisasi rakyat di seluruh Indonesia. YEU juga

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Dikutip dari situs resmi YEU [http://www.yeu.or.id/program\\_detail/myanmar/myanmar](http://www.yeu.or.id/program_detail/myanmar/myanmar) diakses

merupakan anggota dari *Humanitarian Accountability Partnership* (HAP).<sup>44</sup>

Selain melakukan kegiatan tanggap darurat bencana, YEU juga melaksanakan beberapa program yang berkenaan dengan usaha pengurangan resiko bencana dan *recovery*. Salah satu program dalam rangka usaha pengurangan resiko bencana yang telah terlaksana di tahun 2013 silam adalah program inisiatif kesiapsiagaan di kawasan pesisir di sejumlah desa di Manokwari, Papua. Terdapat 3 kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi:<sup>45</sup>

1. Workshop pengkajian kerentanan dan kapasitas,
2. Diskusi tentang perencanaan APBD untuk kesiapsiagaan, dan
3. Membangun jejaring dengan media lokal dalam penyebaran informasi mengenai kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Manokwari.

Program inisiatif kesiapsiagaan di atas didukung oleh Malteser Internasional melalui *German Federal Ministry for Economic Cooperation Development* hingga tahun 2015 mendatang.

Selain mengadakan program inisiatif kesiapsiagaan di Manokwari, YEU juga memfasilitasi sejumlah pelatihan yang komprehensif dengan muatan PRB (Pengurangan Resiko Bencana) kepada sejumlah gereja yang berada di D. I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.

<sup>44</sup> Ibid. [http://www.yeu.or.id/Tentang\\_Kami](http://www.yeu.or.id/Tentang_Kami)

<sup>45</sup> Ibid. *Journal of Theological Studies*, Vol. 1, No. 1, Mei-Juni 2012

Workshop kesiapsiagaan juga disasarkan pada sekolah, mengingat sekolah tidak luput dari ancaman bencana. Workshop tersebut diadakan di SD Dusun, Muntilan yang melibatkan para guru dan komite sekolah. Diharapkan setelah mengikuti workshop, para guru dan komite sekolah dapat lebih siap dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi kapan saja.

Untuk program *recovery*, YEU melakukan pendampingan kemanusiaan kepada para pengungsi Erupsi Gunung Rokatenda, Kabupaten Sikka, NTT. Disamping melakukan kegiatan tanggap darurat bencana, YEU juga memanfaatkan waktu pertemuan dengan masyarakat dengan memberikan penyuluhan kesiapsiagaan bencana dan pengenalan terhadap pengelolaan barak. Bersama dengan UN-OCHA, YEU melakukan pengkajian lapangan untuk mengidentifikasi skema rehabilitasi dan rekonstruksi yang sesuai dengan kondisi di wilayah yang terkena dampak letusan